

**ABSTRAK**

Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara lengkap dan jelas diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Implementasi kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor ini dikatakan berjalan dengan baik jika dalam proses implementasinya pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada bisa sesuai dengan Keputusan Menteri yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga menggambarkan proses yang terjadi dalam implementasi Keputusan Menteri No.71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menteri No.71 Tahun 1993 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah petugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu petugas administrasi dan juga tenaga penguji, serta pemilik kendaraan ataupun supir sebagai kelompok sasaran kebijakan. Sedangkan teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* pada *Key Informan*, lalu dilanjutkan dengan teknik *snowball*. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sembilan kelompok sasaran yang sedang melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Selanjutnya lima petugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, dengan cara memilah – milah data, catatan tertulis untuk menajamkan analisa, menggolongkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya. Kemudian melakukan penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan telah berjalan cukup baik dikarenakan sudah cukup sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 71 sebagai parameter pengukurnya. Dari sembilan penyajian data yang ada delapan diantaranya sudah sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Keputusan Menteri sehingga satu pasal masih perlu mengalami perbaikan yaitu terkait dengan tenaga penguji. Berdasarkan faktor yang ada didapat hasil bahwa faktor komunikasi, sumber daya manusia, lingkungan sosial, dan ketegasan aparat pemerintah menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, sedangkan faktor sumber daya finansial, karakteristik agen pelaksana, dan lingkungan ekonomi menjadi faktor pendukung pengujian berkala kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Kebijakan Publik; Implementasi; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

## ABSTRACT

Periodical motor vehicle inspection is one of the complete and clear decrees issued by the government with its content regulated inside Ministerial Decree Number 71 of the year 1993 regarding Periodical Motor Vehicle Inspection. The implementation of periodical motor vehicle inspection would be said to be running well if within its implementation process, the current periodical motor vehicle inspection can match the regulating Ministerial Decree. This study aims to perceive as well as displays the process happening within the implementation of Ministerial Decree Number 71 of the year 1993 regarding Periodical Motor Vehicle Inspection for guaranteeing safety in Lamongan Regent.

This study is conducted using the qualitative method. The selected research location is the UPT of Motor Vehicle Inspection which is run under the territory of Lamongan Regent. The informants for this research are the inspecting staff of Motor Vehicle Inspection UPT: the administration and also the inspecting officers, along together with vehicle owners or drivers doing periodical motor vehicle inspection at that UPT. The informant selection technique applied is the Purposive Sampling toward Key Informants technique, which then continued with the Snowball technique. The number of informants used in this study are nine targeted groups who were conducting periodical motor vehicle inspection at the UPT of Motor Vehicle Inspection. The first is data reduction through sorting the rough data which were obtained from the interview, then the written notes in order to support the analysis, and the relevant data are categorized so that the final conclusion can be derived. The next step is to present the data, and the last is conclusion making and verification.

In this research it can be concluded that the implementation of motor vehicle inspection in Lamongan Regent has been conducted well because it has matched the Ministerial Decree Number 71 as its measurement parameter. Eight out of nine data displays have corresponded well with the articles contained in Ministerial Decree, making only one that still requires improvement regarding inspecting officers. Based on the obtained results, it is because of communication, human resources, social environment and government apparatus convention factors that become the obstacles in undergoing periodical motor vehicle inspection. On the other hand, financial resources, characteristics of implementators, and economic environment serve as the supporting factors for periodical motor vehicle inspection.

Key Words: Public Policy; Implementation; Periodical Motor Vehicle Inspection